

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

1. Pemberdayaan Perempuan

a. Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan berasal dari kata *empowerment* merupakan konsep yang lahir dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan Barat, terutama Eropa (Prijono dan Pranaka, 1996: 3).

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Sulistyani, 2004: 77). Pemberdayaan berarti pemberian kemampuan dari suatu individu atau kelompok yang sudah berdaya kepada individu atau masyarakat agar menjadi berdaya.

Menurut Karl M. (dalam Prijono dan Pranaka, 1996: 63) pemberdayaan perempuan dipandang sebagai suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan, dan pengawasan

pembuatan keputusan yang lebih besar, dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. Upaya pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan usaha menyadarkan dan membantu mengembangkan potensi yang ada, sehingga menjadi manusia yang mandiri.

b. Tujuan Pemberdayaan Perempuan

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan menurut Ambar T. Sulistyani (2004: 80) adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi menggunakan daya kemampuan yang meliputi kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan penggerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

Kemandirian masyarakat dapat dicapai melalui sebuah proses, melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan di atas. Tujuan pemberdayaan perempuan menurut Sumodiningrat yaitu sebagai berikut.

1) Membangun eksistensi, dalam hal ini eksistensi perempuan.

Perempuan harus menyadari harus bahwa ia mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Tidak seharusnya kaum perempuan selalu berada dalam posisi yang terpuruk. Perempuan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri.

- 2) Memotivasi perempuan agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidup melalui proses dialog. Perempuan juga berhak menentukan pilihan, tidak selamanya harus menurut pada laki-laki.
- 3) Menumbuhkan kesadaran pada diri perempuan tentang kesetaraan dan kedudukannya baik di sektor publik maupun domestik.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender agar mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga perempuan dapat mandiri dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

c. Tahap-tahap pemberdayaan

Tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat menurut Ambar T. Sulistyani (2004:83-84) meliputi.

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan. Pada tahap ini pihak pemberdaya/aktor/pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat itu, dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.
- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Proses transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan dapat berlangsung dengan baik, penuh semangat, dan berjalan efektif jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang relevan dengan

tuntutan kebutuhan. Pada tahap ini masyarakat dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum mampu menjadi subyek dalam pembangunan.

- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Tahap ini merupakan tahap pengayaan atau peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan yang diperlukan supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi dan melakukan inovasi- inovasi dalam lingkungannya. Apabila masyarakat dapat melakukan tahap ini, maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan.

2. Kajian Gender

a. Konsep Gender

Pemahaman dan pembedaan antara konsep seks dan gender sangatlah diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpakan kaum perempuan. Hal ini disebabkan karena ada kaitan yang erat antara perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender

(*gender inequalities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas (Fakih, 2008: 3).

Untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki atau bersifat seperti daftar berikut : laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala, dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui (Fakih, 2008: 7-8)

Sedangkan konsep lainnya adalah konsep gender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikontruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional,jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional, perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain (Fakih, 2008: 8).

Sejarah perbedaan gender (*gender differences*) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan maupun negara. Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan.

b. Ketidakadilan Gender dan Kesetaraan Gender

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun, yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Untuk memahami bagaimana perbedaan menyebabkan ketidakadilan gender, dapat dilihat melalui berbagai manifestasi ketidakadilan yang ada. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni: Marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam

keputusan politik, pembentukan stereotip atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender (Fakih, 2008: 12).

c. Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender

Uraian berikut membahas secara lebih rinci masing-masing manifestasi ketidakadilan gender.

1) Gender dan Marginalisasi Perempuan

Proses marginalisasi, yang mengakibatkan kemiskinan, sesungguhnya banyak sekali terjadi dalam masyarakat dan negara yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan, yang disebabkan oleh berbagai kejadian, misalnya penggusuran, bencana alam, atau proses eksploitasi. Namun ada salah satu bentuk pemiskinan atas satu jenis kelamin tertentu, dalam hal ini perempuan, disebabkan oleh gender. Ada beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme proses marginalisasi kaum perempuan karena perbedaan gender tersebut. Dari segi sumbernya bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.

Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan bahkan negara. Marginalisasi terhadap

perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan. Misalnya banyak di antara suku-suku di Indonesia yang tidak memberi hak kepada kaum perempuan untuk mendapatkan waris sama sekali. Sebagian tafsir keagamaan memberi hak waris setengah dari hak waris laki-laki terhadap kaum perempuan (Fakih, 2008: 13-15)

2) Gender dan Subordinasi

Pandangan gender ternyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting.

Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Dahulu di Jawa ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh akhirnya akan ke dapur juga. Bahkan, pemerintah pernah memiliki peraturan bahwa jika suami akan pergi belajar (jauh dari keluarga) dia bisa mengambil keputusan sendiri. Sedangkan bagi istri yang hendak tugas belajar ke luar negeri harus seizin suami. Dalam rumah tangga masih sering terdengar jika keuangan keluarga

sangat terbatas, dan harus mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak-anaknya maka anak laki-laki akan mendapatkan prioritas utama. Praktik seperti itu sesungguhnya berangkat dari kesadaran gender yang tidak adil (Fakih, 2008: 15-16).

3) Gender dan Stereotipe

Secara umum stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Celakanya stereotipe selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Salah satu jenis stereotip itu adalah yang bersumber dari pandangan gender. Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, yang bersumber dari penandaan (stereotipe) yang dilekatkan kepada mereka. Misalnya, penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya, maka tiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotipe ini. Bahkan jika ada pemeriksaan yang dialami oleh perempuan, masyarakat berkecenderungan menyalahkan korbannya. Masyarakat memiliki anggapan bahwa tugas utama kaum perempuan adalah melayani suami. Stereotipe ini berakibat wajar sekali jika pendidikan kaum perempuan dinomorduakan. Stereotipe terhadap kaum perempuan ini terjadi dimana mana. Banyak

peraturan pemerintah, aturan keagamaan, kultur dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena stereotipe tersebut (Fakih, 2008: 16-17).

4) Gender dan Kekerasan

Kekerasan (*violence*) adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut *gender-related violence*. Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Banyak macam dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender, diantaranya:

Pertama, bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk pemerkosaan dalam perkawinan. Kedua, tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (*domestic violence*). Termasuk tindak kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap anak-anak (*child abuse*). Ketiga, bentuk penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin (*genital mutilation*), misalnya penyunatan terhadap anak perempuan. Keempat, kekerasan dalam bentuk pelacuran (*prostitution*). Kelima, kekerasan dalam bentuk ponografi. Keenam,

kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam Keluarga Berencana (*forced sterilization*). Ketujuh, adalah jenis kekerasan terselubung (*molestation*), yakni memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan pelbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh (Fakih, 2008: 17-20).

5) Gender dan Beban Kerja

Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Konsekuensinya, banyak kaum perempuan yang harus bekerja keras dan lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangganya, mulai dari membersihkan dan mengepel lantai, memasak, mencuci, mencari air untuk mandi, hingga memelihara anak. Pada kalangan keluarga miskin beban yang sangat berat ini ditanggung oleh perempuan sendiri. Terlebih-lebih jika si perempuan tersebut harus bekerja, maka ia memikul beban kerja ganda.

Bias gender yang mengakibatkan beban kerja tersebut seringkali diperkuat dan disebabkan oleh adanya pandangan atau keyakinan di masyarakat bahwa pekerjaan yang dianggap masyarakat sebagai jenis “pekerjaan perempuan”, seperti

semua pekerjaan domestik, dianggap dan dinilai rendah dibandingkan dengan pekerjaan yang dianggap sebagai “pekerjaan lelaki”, serta dikategorikan sebagai “bukan produktif” sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi negara. Sementara itu kaum perempuan, karena anggapan gender ini, sejak dulu telah disosialisasikan untuk menekuni peran gender mereka. Di lain pihak kaum lelaki tidak diwajibkan secara kultural untuk menekuni berbagai jenis pekerjaan domestik itu. Kesemuanya ini telah memperkuat pelanggengan secara kultural dan struktural beban kerja kaum perempuan (Fakih, 2008: 21).

3. Teori Fungsional Struktural

Teori ini memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri atas bagian yang saling berkaitan (agama, pendidikan, struktur politik, sampai rumah tangga). Masing-masing bagian secara terus menerus mencari keseimbangan (*equilibrium*) dan harmoni. Konflik di masyarakat dilihat tidak fungsional maka status quo harus dipertahankan (Fakih, 2006: 31-32). Hal ini dimaksudkan adalah untuk menjaga keseimbangan sosial yang ada.

Menurut teori fungsional-struktural, masyarakat sebagai sistem memiliki struktur yang terdiri dari banyak lembaga, dimana masing-masing lembaga memiliki fungsi sendiri-sendiri. Struktur dan fungsi

dengan kompleksitas yang berbeda-beda, ada pada setiap masyarakat baik masyarakat modern maupun primitif (Zamroni, 1992: 25).

Lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat dianggap sama dengan organ-organ tubuh. Lembaga sosial sebagai unsur struktur, dianggap dapat memenuhi kebutuhan, kelangsungan hidup, dan pemeliharaan masyarakat. Setiap lembaga sosial mempunyai fungsinya masing-masing dan dalam hubungan antara satu dengan lainnya (Soekanto, 1984: 10).

Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons

AGIL. Fungsi adalah “suatu gagasan aktivitas yang diarahkan untuk memenuhi satu atau beberapa kebutuhan sistem”. Menggunakan definisi ini, Parsons percaya bahwa ada empat imperatif fungsional yang diperlukan (atau menjadi ciri) seluruh sistem adaptasi (*adaptation*), pencapaian tujuan (*goal attainment*), integrasi (*integration*), dan latensi (*latency*), atau disebut sebagai skema AGIL. Agar bertahan hidup, sistem harus menjalankan keempat fungsi tersebut:

1. Adaptasi: sistem harus mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya.
2. Pencapaian tujuan: sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utamanya.

3. Integrasi. Sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Ia pun harus mengatur hubungan antar ketiga imperatif fungsional tersebut (A, G, L).
4. Latensi (pemeliharaan pola). Sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbarui motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut (Ritzer, 2011: 257).

Organisasi behavioral adalah sistem tindakan yang menangani fungsi adaptasi dengan menyesuaikan dan mengubah dunia luar. Sistem kepribadian menjalankan fungsi pencapaian tujuan dengan mendefinisikan tujuan sistem dan mobilisasi sumber daya yang digunakan untuk mencapainya. Sistem sosial menangani fungsi integrasi dengan mengontrol bagian-bagian yang menjadi komponennya. Akhirnya, sistem kultural menjalakan fungsi latensi dengan membekali aktor dengan norma dan nilai-nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak (Ritzer, 2011: 257).

Parsons menemukan jawaban masalah tatanan dalam fungsionalisme struktural yang dalam pandangannya berkisar dalam asumsi berikut:

1. Sistem memiliki tatanan dan bagian-bagian yang tergantung satu sama lain.

2. Sistem cenderung menjadi tatanan yang memelihara dirinya, atau ekuilibrium.
3. Sistem bisa jadi statis atau mengalami proses perubahan secara tertata.
4. Sifat satu bagian sistem berdampak pada kemungkinan bentuk bagian lain.
5. Sistem memelihara batas-batas dengan lingkungan mereka.
6. Alokasi dan integrasi adalah dua proses fundamental yang diperlukan bagi kondisi ekuilibrium sistem.
7. Sistem cenderung memelihara dirinya yang meliputi pemeliharaan batas dan hubungan bagian-bagian dengan keseluruhan, kontrol variasi lingkungan, dan kontrol kecenderungan untuk mengubah sistem dari dalam.

Sistem Sosial. Parsons menempatkan kompleks status-peran sebagai unit terdasar dari sistem. Status merujuk pada posisi struktural dalam sistem sosial, dan peran adalah apa yang dilakukan aktor dalam suatu posisi, yang dilihat dalam konteks signifikansi fungsionalnya bagi sistem yang lebih besar. Aktor tidak dipandang menurut pemikiran dan tindakan, karena dia tidak lain hanyalah sekumpulan status dan peran (Ritzer, 2011: 259-260).

Selain perhatian terhadap status-peran, Parsons tertarik pada komponen sistem sosial besar seperti kolektivitas, norma, dan nilai. Analisis sistem sosialnya, Parsons tidak sekedar seorang strukturalis,

namun juga seorang fungsionalis. Ia menguraikan sejumlah persyaratan fungsional bagi sistem sosial. Pertama, sistem sosial harus terstruktur sedemikian rupa sehingga dapat beroperasi secara baik dengan sistem yang lain. Kedua, agar dapat bertahan hidup, sistem sosial harus didukung sebelumnya oleh sistem lain. Ketiga, sistem harus secara signifikan memenuhi proporsi kebutuhan aktor-aktornya. Keempat, sistem harus menimbulkan partisipasi yang memadai dari anggotanya. Kelima, sistem paling tidak harus memiliki kontrol minimum terhadap perilaku yang berpotensi merusak. Keenam, jika konflik menjadi sesuatu yang menimbulkan kerusakan signifikan, ia harus dikontrol (Ritzer, 2011: 260).

Masyarakat. Sistem yang paling spesifik dan penting adalah masyarakat, “sebuah kolektifitas yang relatif mandiri, dan anggotanya mampu memenuhi seluruh kebutuhan individual dan kolektif dan sepenuhnya hidup dalam kerangka kerja kolektif”. Parsons membedakan empat struktur atau subsistem dalam masyarakat menurut fungsi (AGIL) yang mereka jalankan yaitu ekonomi, politik, sistem pengasuhan, dan komunitas masyarakat. Ekonomi adalah subsistem yang dapat difungsikan masyarakat dalam beradaptasi dengan lingkungan melalui kerja, produksi, dan alokasi. Melalui kerja, ekonomi menyesuaikan lingkungan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan ia membantu masyarakat beradaptasi dengan realitas-realitas eksternal ini. Politik digunakan masyarakat untuk mencapai

tujuan-tujuan mereka serta memobilisasi aktor dan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Sistem pengasuhan menangani fungsi latensi dengan mengajarkan kebudayaan kepada aktor dan menginternalisasikannya kepada mereka. Akhirnya, fungsi integrasi dijalankan oleh komunitas masyarakat, yang mengatur beragam komponen masyarakat (Ritzer, 2011: 262).

Dalam penelitian ini berusaha untuk menganalisa fungsi ataupun peran kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) Minasari dalam pemberdayaan perempuan di Dusun Beji, Sumberagung, Jetis, Bantul. Dengan adanya berbagai kegiatan dan pelatihan, diharapkan dapat mengembangkan keterampilan agar dapat ikut aktif dalam kegiatan pembangunan dan perekonomian.

B. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang relevan pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nuriyah (2010), mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta, dengan judul penelitian “Pemberdayaan Ketrampilan Perempuan di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW)”. Penelitian tersebut dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa tujuan dari panti sosial tersebut yaitu menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita, memulihkan kembali harga diri, tanggung jawab sosial, kemajuan dan kemampuan para perempuan agar dapat merasakan hidup wajar dalam masyarakat. Manfaat pemberian keterampilan tersebut bagi warga binaan adalah

memberi bekal keterampilan dan pengetahuan terkait dengan keterampilan yang diikuti.

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian yang relevan dapat diketahui bahwa penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang proses pemberdayaan perempuan. Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nuriyah tersebut fokus penelitiannya pada pemberdayaan keterampilan perempuan yang mengalami permasalahan kekerasan dan memulihkan kembali harga diri, serta kemampuan para perempuan agar dapat merasakan hidup wajar, sedangkan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini difokuskan pada pemberdayaan perempuan melalui kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) Minasari ditinjau dari perspektif gender di Dusun Beji, Sumberagung, Jetis, Bantul.

2. Penelitian yang relevan kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Waryatin (2011), mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta, dengan judul “Pemberdayaan Perempuan dalam Mengembangkan Kewirausahaan pada LKP Bu Nandang di Kelurahan Gumili Kabupaten Cilacap”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan dalam mengembangkan kewirausahaan di LKP “Bu Nandang” dilakukan dengan tiga tahap yaitu: tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku

sadar, tahap transformasi kemampuan berupa wawasan, pengetahuan, dan keterampilan, dan tahap peningkatan kemampuan intelektual, keterampilan menuju kemandirian. Adapun faktor pendukung pemberdayaan perempuan dalam mengembangkan kewirausahaan antara lain fasilitas, pengajar berkompetensi, pendidikan gratis, partisipasi dan motivasi masyarakat yang tinggi, sedangkan faktor penghambatnya antara lain ruang belajar, kurangnya pengajar, pendanaan, modal usaha, waktu, dan keluarga.

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian yang relevan dapat diketahui bahwa penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang pemberdayaan yang dilakukan untuk kaum perempuan. Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Waryatin tersebut fokus penelitiannya pada pemberdayaan perempuan dalam mengembangkan kewirausahaan yang dilakukan oleh LKP “Bu Nandang”. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada pemberdayaan perempuan melalui kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) Minasari ditinjau dari perspektif gender di Dusun Beji, Sumberagung, Jetis, Bantul.

3. Penelitian yang relevan ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Maisaroh (2011), mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta, dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Rumah Pintar Pijoengan di Dusun Daraman, Srimartani, Piyungan, Bantul,

Yogyakarta". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses pemberdayaan yang dilakukan Rumah Pintar "Pijoengan" bersifat edukasi. Masyarakat diberikan berbagai macam kursus serta disediakan sarana dan prasarana yang menunjang proses pemberdayaan. Dampak dari adanya Rumah Pintar "Pijoengan" ini memberikan banyak respon positif bagi masyarakat. Masyarakat diberikan berbagai macam kemudahan serta kursus dengan gratis. Hasil dari pemberdayaan yang dilakukan Rumah Pintar "Pijoengan" adalah masyarakat menjadi tidak bergantung dengan orang lain karena mereka mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri dengan bekal keterampilan yang dimiliki (mandiri), masyarakat menjadi tanggap akan berbagai pengaruh teknologi dan wawasan mereka menjadi berkembang (berpengetahuan), dan menjadi masyarakat yang berdayaguna (mampu menciptakan lapangan sendiri).

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian yang relevan dapat diketahui bahwa penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang pemberdayaan. Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Maisaroh tersebut fokus penelitiannya pada pemberdayaan masyarakat melalui Rumah Pintar "Pijoengan", serta dampak dan hasil yang dicapai dari program pemberdayaan. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada

pemberdayaan perempuan melalui kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) Minasari ditinjau dari perspektif gender di Dusun Beji, Sumberagung, Jetis, Bantul.

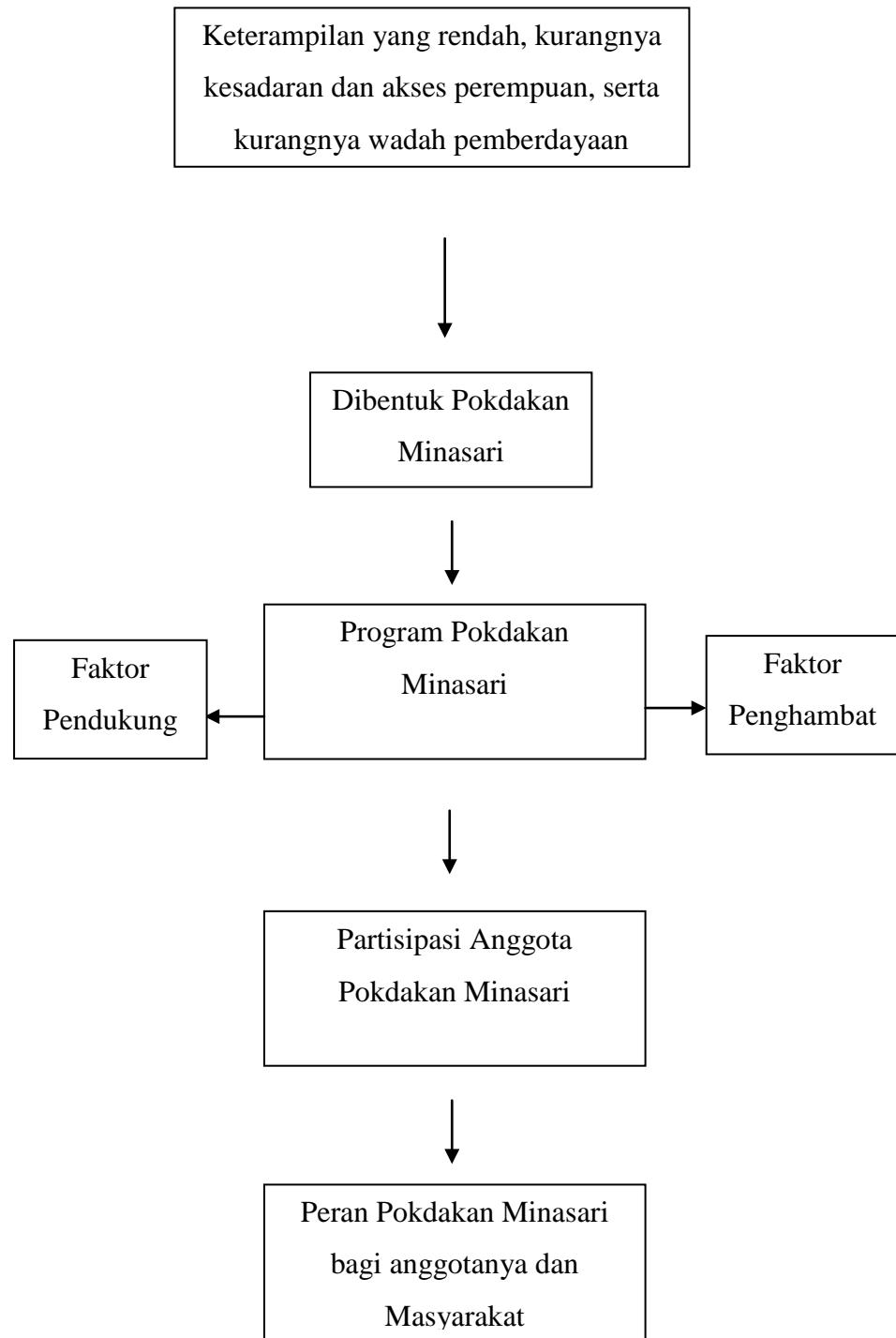
Kesimpulan yang dapat diambil bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian- penelitian yang sebelumnya serta belum pernah diteliti oleh orang lain. Penelitian ini akan mengkaji tentang pemberdayaan perempuan melalui kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) Minasari ditinjau dari perspektif gender di Dusun Beji, serta faktor pendukung dan penghambatnya.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir yang diarahkan dalam penelitian ini adalah bahwa masih banyak perempuan di Dusun Beji yang kurang memiliki keterampilan disebabkan kurangnya wadah untuk mengembangkan keterampilan. Untuk itu, maka dibentuklah sebuah Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Minasari yang diharapkan dapat mengembangkan keterampilan perempuan agar dapat ikut aktif dalam kegiatan pembangunan dan perekonomian.

Pemberdayaan sangat diperlukan bagi masyarakat khususnya untuk kaum perempuan agar bisa hidup mandiri. Salah satu wadah untuk pemberdayaan perempuan ialah kelompok pembudidaya ikan (pokdakan). Dengan dibentuknya Pokdakan Minasari ini maka dapat menjadi wadah perempuan untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan berupa cara-cara memelihara dan membudidayakan ikan agar lebih

produktif. Dalam pokdakan Minasari dibuat beberapa program kegiatan, namun pelaksanaan program pun mempengaruhi beberapa faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Partisipasi dari semua anggota pokdakan ini juga sangat diperlukan guna keberhasilan dan peningkatan produksi. Adanya pokdakan ini akan memberikan peran bagi anggotanya maupun masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut.



Bagan 1. Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir di atas dapat dijelaskan bahwa banyak ibu rumah tangga yang mempunyai keterampilan rendah, kurangnya kesadaran dan akses perempuan, serta kurangnya wadah pemberdayaan maka dibentuklah sebuah Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Minasari yang diharapkan sebagai wadah perempuan dalam mengembangkan keterampilan dan potensinya agar dapat ikut aktif dalam kegiatan pembangunan dan perekonomian.